



Pemetaan Stakeholder dalam Rencana Tata Tanam Global Berbasis Neraca Air Irigasi

Oktaviano^{1*}, Efrilia², Ali Sadikin³

¹⁻³Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: oktatmbg@gmail.com^{1*}, eviprabuagung@gmail.com², alisk68@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: oktatmbg@gmail.com

Abstract. Stakeholder mapping is not merely an auxiliary communication activity in irrigation planning; it is a governance instrument that determines whether technical water-balance calculations can be converted into legitimate cropping schedules, coordinated operations, and collective compliance at the field level. This study analyzes the configuration of stakeholders in the implementation of a water-balance-based Global Cropping Plan (RTTG) in Musi Rawas Regency, Indonesia. A descriptive qualitative case-study approach was employed. Data were collected through field observation, in-depth interviews, and focus group discussions involving local government agencies, planning and technical departments, irrigation officers, agricultural extension workers, farmer water-user associations, farmer groups, rice farmers, fish farmers, and community water users. The data were processed through thematic coding, role identification, triangulation, and a power-interest matrix. The findings indicate that RTTG implementation depends on the alignment of four actor clusters: policy steering actors, technical-operational actors, regulatory and resource-support actors, and water users. Promoters with high power and high interest must be engaged intensively as policy legitimators and coordination drivers; latents must be approached through legal, budgetary, and institutional arguments; defenders require participatory empowerment as field implementers and social monitors; and apathetics need concise public information to prevent misinformation. The study concludes that stakeholder mapping strengthens adaptive irrigation governance by integrating technical data, institutional authority, farmer participation, and food-security objectives.

Keywords: Collaborative Governance; Cropping Plan; Irrigation Governance; Power-Interest Matrix; Stakeholder Mapping; Water Balance.

Abstrak. Pemetaan stakeholder bukan sekadar kegiatan pendukung komunikasi dalam perencanaan irigasi, melainkan instrumen tata kelola yang menentukan apakah perhitungan teknis neraca air dapat diterjemahkan menjadi jadwal tanam yang sah, operasi irigasi yang terkoordinasi, dan kepatuhan kolektif di tingkat lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi stakeholder dalam implementasi Rencana Tata Tanam Global (RTTG) berbasis neraca air irigasi di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah yang melibatkan pemerintah daerah, perangkat perencanaan, OPD teknis, petugas irigasi, penyuluh pertanian, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani, petani padi, pembudidaya ikan, dan masyarakat pengguna air. Data dianalisis melalui pengkodean tematik, identifikasi peran, triangulasi, serta matriks pengaruh-kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTTG bergantung pada keselarasan aktor pengarah kebijakan, aktor teknis-operasional, aktor pendukung regulasi dan sumber daya, serta pengguna air. Promoters perlu dilibatkan intensif sebagai pemberi legitimasi dan penggerak koordinasi; latents didekati melalui argumen legal, anggaran, dan kelembagaan; defenders diberdayakan sebagai pelaksana lapangan dan pengawas sosial; sedangkan apathetics diberi informasi ringkas untuk mencegah misinformasi. Penelitian ini menegaskan bahwa peta stakeholder memperkuat tata kelola irigasi adaptif dengan mengintegrasikan data teknis, kewenangan kelembagaan, partisipasi petani, dan tujuan ketahanan pangan daerah.

Kata kunci: Analisis Stakeholder; Irigasi; Matriks Pengaruh-Kepentingan; Neraca Air; Rencana Tata Tanam; Tata Kelola Kolaboratif.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan irigasi pada tingkat daerah merupakan persoalan tata kelola sumber daya air yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kelembagaan, distribusi kewenangan, kepatuhan sosial, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data teknis dengan proses

pengambilan keputusan. Pada wilayah pertanian yang menggantungkan produksi pada jaringan irigasi, pengaturan jadwal tanam dan pembagian air tidak hanya ditentukan oleh debit, luas layanan, atau kondisi saluran, tetapi juga oleh sejauh mana perangkat daerah, petugas teknis, penyuluh, kelembagaan petani, petani padi, pembudidaya ikan, serta masyarakat pengguna air memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Ketika koordinasi antaraktor lemah, kebijakan tata tanam cenderung fragmentaris, reaktif, dan rentan menimbulkan ketidaksinkronan antara kalender tanam, ketersediaan air, kebutuhan komoditas, serta kepentingan pengguna air di tingkat lapangan.

Di Kabupaten Musi Rawas, tantangan tersebut terlihat dari keterbatasan air pada musim kemarau, belum sinkronnya pola tanam antarwilayah irigasi, variasi kondisi jaringan, dan meningkatnya permintaan air untuk pertanian serta perikanan. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa dari 33 daerah irigasi, hanya 21 daerah irigasi yang masih fungsional, dengan rerata kondisi jaringan sekitar 56,92%. Angka ini memperlihatkan bahwa kapasitas fisik jaringan belum sepenuhnya mampu menjamin pelayanan air secara merata. Oleh karena itu, penyelesaian masalah irigasi tidak cukup diarahkan pada rehabilitasi fisik, tetapi perlu didukung oleh data neraca air yang dapat dipercaya, pembagian peran lintas-OPD, mekanisme komunikasi dengan pengguna air, dan kesepakatan kelembagaan yang mampu diterima oleh para pelaksana di lapangan.

RTTG berbasis neraca air irigasi menjadi relevan karena menawarkan dasar perencanaan yang lebih rasional dalam menghubungkan ketersediaan air, kebutuhan air tanaman, waktu tanam, dan prioritas pemanfaatan air. Namun, pendekatan neraca air tidak otomatis menjamin kepatuhan jika tidak diterjemahkan ke dalam tata kelola yang inklusif. Dalam literatur water governance, keterlibatan stakeholder dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat legitimasi, meminimalkan konflik, dan membangun penerimaan sosial terhadap kebijakan (Lim et al., 2022; Salamanca-Cano & Durán-Díaz, 2023; Whitley et al., 2025). Dalam konteks irigasi, fungsi ini menjadi sangat penting karena keputusan pembagian air langsung memengaruhi pendapatan petani, produktivitas lahan, kesinambungan usaha perikanan, dan stabilitas sosial antarpengguna air.

Sejumlah studi menegaskan bahwa pemetaan stakeholder dapat digunakan untuk membaca siapa aktor kunci, aktor pendukung, aktor yang perlu diberdayakan, serta aktor yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam pengelolaan sumber daya air. Power-interest matrix memberikan kerangka untuk membedakan strategi pelibatan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan setiap aktor, sehingga pemerintah tidak menggunakan pendekatan komunikasi yang seragam kepada semua pihak (D'Agostino et al., 2020; Lee et al., 2024; Sarami-

Foroushani et al., 2024). Studi di Indonesia juga menunjukkan bahwa tata kelola air yang adaptif memerlukan pemahaman atas relasi, interaksi, dan koordinasi stakeholder agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi praktik kolaboratif yang berjalan di tingkat lapangan (Handayani et al., 2023).

Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan peta stakeholder sebagai instrumen analitis utama untuk membaca kesiapan tata kelola RTTG berbasis neraca air irigasi di tingkat daerah. Kajian mengenai RTTG sering berpusat pada aspek teknis, seperti pola tanam, kebutuhan air tanaman, debit andalan, luas layanan, dan jadwal distribusi. Artikel ini memperluas sudut pandang tersebut dengan menegaskan bahwa keberhasilan RTTG tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perhitungan neraca air, tetapi juga oleh kemampuan menata relasi kuasa, kepentingan, kewenangan, dan partisipasi para aktor. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi stakeholder, memetakan posisi stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan, serta merumuskan strategi pelibatan stakeholder dalam implementasi RTTG berbasis neraca air irigasi di Kabupaten Musi Rawas.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori stakeholder berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh aktor yang memiliki kepentingan terhadap keputusan dan/atau memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses keputusan. Dalam kebijakan publik, stakeholder tidak hanya merujuk pada lembaga formal pemerintah, tetapi juga mencakup pengguna layanan, kelompok masyarakat, organisasi teknis, aktor ekonomi, dan kelompok yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan. Freeman (1984) menekankan pentingnya mengenali pihak-pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, sedangkan Bryson (2004) menempatkan analisis stakeholder sebagai perangkat strategis untuk membangun legitimasi, memetakan dukungan, mengantisipasi resistensi, dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

Pada pengelolaan sumber daya air, stakeholder engagement merupakan bagian dari tata kelola air yang inklusif dan adaptif. OECD (2015) menegaskan bahwa pelibatan para pihak perlu dirancang secara jelas, transparan, berbasis tujuan, dan berorientasi pada hasil kebijakan. Pelibatan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga membangun proses pembelajaran sosial karena setiap aktor membawa pengetahuan, pengalaman, kepentingan, serta persepsi risiko yang berbeda (Wehn et al., 2018). Dalam konteks irigasi, pembelajaran sosial penting untuk menjembatani perbedaan antara perhitungan teknis pemerintah dan pengalaman empiris pengguna air di lahan.

Konsep collaborative governance memperkuat penjelasan bahwa masalah publik yang kompleks, termasuk pengaturan air irigasi, tidak dapat diselesaikan secara hierarkis oleh satu lembaga. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan collaborative governance sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan lembaga publik dan stakeholder nonnegara secara deliberatif, formal, dan berorientasi konsensus. Dalam pengelolaan irigasi, pendekatan ini relevan karena keputusan mengenai jadwal tanam, giliran air, pemeliharaan jaringan, dan prioritas pemanfaatan air membutuhkan kesepahaman antara otoritas kebijakan, operator teknis, penyuluh, dan pengguna air.

Matriks pengaruh-kepentingan merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan kapasitas memengaruhi keputusan dan tingkat keterkaitannya dengan hasil kebijakan. Aktor dengan pengaruh dan kepentingan tinggi perlu dikelola secara intensif sebagai penggerak utama. Aktor dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingan operasional lebih rendah perlu dijaga kepuasannya agar tetap memberikan dukungan regulasi, anggaran, dan kewenangan. Aktor dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruh formal rendah perlu diberdayakan agar mampu berpartisipasi sebagai pelaksana, penyedia data, dan pengawas sosial. Sementara itu, aktor dengan pengaruh dan kepentingan rendah tetap perlu memperoleh informasi dasar agar tidak menjadi sumber misinformasi. Model ini sesuai untuk pengelolaan irigasi karena setiap aktor memiliki kombinasi kewenangan, akses informasi, dan kepentingan yang berbeda terhadap air (Lee et al., 2024; Sarami-Foroushani et al., 2024).

Dalam RTTG berbasis neraca air, pemetaan stakeholder menjadi titik temu antara rasionalitas teknis dan legitimasi sosial. Neraca air menyediakan dasar perhitungan untuk menilai kecukupan air, kebutuhan komoditas, periode tanam, dan risiko kekurangan air. Namun, hasil perhitungan tersebut baru memiliki daya implementatif ketika diterjemahkan menjadi jadwal tanam, aturan distribusi, mekanisme pemantauan, dan forum umpan balik yang dipahami oleh pengguna air. Oleh sebab itu, peta stakeholder bukan sekadar lampiran komunikasi, melainkan desain kelembagaan yang menghubungkan data, regulasi, operasi irigasi, kepatuhan petani, dan tujuan ketahanan pangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan memahami struktur aktor, peran, kepentingan, pengaruh, dan pola hubungan stakeholder dalam implementasi RTTG berbasis neraca air irigasi. Lokasi penelitian adalah

Kabupaten Musi Rawas, dengan unit analisis berupa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, atau terdampak oleh kebijakan RTTG. Desain studi kasus memungkinkan penelitian menangkap konteks kelembagaan daerah, kondisi jaringan irigasi, serta dinamika komunikasi antaraktor secara lebih mendalam.

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan, kewenangan, pengetahuan lapangan, dan keterdampakan terhadap RTTG. Informan mencakup unsur Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Bappeda, Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, UPT irigasi, petugas pengairan, penyuluh pertanian, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani, petani padi, pembudidaya ikan, serta masyarakat pengguna air. Data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks, meliputi data daerah irigasi, kondisi jaringan, statistik pertanian, dokumen regulasi, dokumen perencanaan daerah, dan literatur ilmiah tentang stakeholder analysis, collaborative governance, dan water governance.

Pengumpulan data diarahkan pada lima fokus utama, yaitu identifikasi aktor, penelusuran peran, penilaian kepentingan, penilaian pengaruh, dan kebutuhan strategi komunikasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar kategorisasi stakeholder yang memuat nama aktor/instansi, hubungan dengan RTTG, kewenangan, kepentingan, potensi dukungan, potensi hambatan, akses informasi, kebutuhan komunikasi, dan bentuk pelibatan yang paling sesuai. Data dianalisis melalui reduksi data, pengkodean tematik, penyajian matriks, triangulasi sumber dan teknik, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif.

Alat analisis utama adalah power-interest matrix yang mengelompokkan stakeholder ke dalam empat kuadran, yaitu promoters, latents, defenders, dan apathetics. Pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan stakeholder memengaruhi keputusan, regulasi, alokasi anggaran, penyediaan data, operasi jaringan, pengawasan, atau kepatuhan pengguna air. Kepentingan didefinisikan sebagai tingkat keterkaitan dan keterdampakan stakeholder terhadap keberhasilan RTTG, baik sebagai pengambil kebijakan, pelaksana teknis, penyedia data, pengguna air, maupun penerima manfaat. Penempatan aktor dalam matriks dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan hasil wawancara, observasi, dokumen pendukung, dan triangulasi antar-sumber. Hasil pemetaan kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan strategi komunikasi dan pelibatan pada setiap kuadran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kebijakan RTTG Berbasis Neraca Air Irigasi

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan, RTTG berbasis neraca air irigasi di Kabupaten Musi Rawas dipahami sebagai instrumen tata kelola yang mengintegrasikan ketersediaan air, kebutuhan tanaman, kondisi jaringan, jadwal tanam, prioritas pemanfaatan air, dan koordinasi lintas sektor. RTTG tidak hanya berisi pengaturan pola tanam, tetapi juga memuat proses penyelarasan antara data hidrologis, kapasitas infrastruktur, kesiapan petani, dan kemampuan kelembagaan daerah dalam mengelola distribusi air. Neraca air irigasi berfungsi sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara pasokan air dan kebutuhan air bagi pertanian, perikanan, serta pengguna lain pada periode tertentu.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa efektivitas RTTG sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan informasi teknis menjadi aturan operasional yang mudah dipahami dan diterima oleh pengguna air. Data neraca air memberikan dasar rasional untuk menetapkan pola tanam dan jadwal distribusi, tetapi implementasi di lapangan membutuhkan legitimasi, komunikasi, dan kesepakatan sosial. Dengan demikian, RTTG seharusnya diposisikan sebagai perangkat koordinasi kebijakan dan operasi lapangan, bukan sekadar dokumen kalender tanam. Pada titik ini, peta stakeholder menjadi penting karena menentukan siapa yang perlu mengambil keputusan, siapa yang menyiapkan data, siapa yang menjalankan operasi, siapa yang menerima dampak, dan siapa yang harus dilibatkan dalam mekanisme pengawasan.

Identifikasi Stakeholder dalam Implementasi RTTG

Hasil wawancara, FGD, dan penilaian peran menunjukkan bahwa stakeholder RTTG di Kabupaten Musi Rawas dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu aktor pengarah kebijakan, aktor teknis-operasional, aktor pendukung regulasi dan sumber daya, serta aktor pengguna air dan penerima manfaat. Aktor pengarah kebijakan berperan memberi legitimasi, memastikan keselarasan dengan agenda pembangunan daerah, dan menggerakkan koordinasi antar-OPD. Aktor teknis-operasional bertugas menyiapkan data, menganalisis kebutuhan air, mengatur operasi jaringan, memantau debit, dan mendampingi petani. Aktor pendukung regulasi dan sumber daya memperkuat dasar hukum, anggaran, serta sinergi kewenangan. Sementara itu, aktor pengguna air berperan sebagai pelaksana jadwal tanam, sumber informasi kondisi lapangan, penerima manfaat, dan pengawas sosial distribusi air.

Kategori tersebut menunjukkan bahwa implementasi RTTG memiliki karakter multiaktor dan lintas-skala. Setiap kelompok aktor memiliki sumber daya yang berbeda: sebagian memiliki kewenangan formal, sebagian menguasai data teknis, sebagian memiliki

akses ke komunitas petani, dan sebagian menjadi pihak yang paling terdampak oleh keputusan pembagian air. Relasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan RTTG tidak dapat bertumpu pada satu OPD atau satu instrumen teknis. Dalam kerangka collaborative governance, diperlukan mekanisme komunikasi yang mampu mengurangi fragmentasi, membangun kepercayaan, menghindari dominasi aktor tertentu, serta memperkuat kesepahaman tentang tujuan ketahanan pangan daerah.

Tabel 1. Identifikasi Kelompok Stakeholder RTTG Berbasis Neraca Air Irigasi.

Kelompok stakeholder	Aktor/instansi	Peran utama
Pengarah kebijakan	Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bappeda, PUCKTRP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan	Memberikan legitimasi, menetapkan arah kebijakan, menyelaraskan agenda pembangunan, menggerakkan koordinasi lintas-OPD, serta memastikan RTTG menjadi bagian dari prioritas ketahanan pangan daerah.
Teknis-operasional	UPT irigasi, petugas pengairan, penyuluh, P3A/GP3A/IP3A kunci	Mengumpulkan dan memvalidasi data irigasi, memantau debit, menyusun pola/jadwal tanam, mengawal pembagian air, mendampingi petani, dan menyampaikan umpan balik lapangan.
Regulasi dan sumber daya	DPRD, BPKAD, Bagian Hukum, pemerintah provinsi, balai wilayah sungai/instansi teknis terkait	Memperkuat dasar hukum, dukungan anggaran, harmonisasi kewenangan, dan integrasi program lintas pemerintahan.
Pengguna air dan penerima manfaat	Petani padi, pembudidaya ikan, kelompok tani, Gapoktan, P3A lapangan, masyarakat pengguna air	Melaksanakan jadwal tanam dan kesepakatan giliran air, menyediakan informasi kondisi lapangan, menerima manfaat, serta melakukan pengawasan sosial terhadap distribusi air.

Peta Stakeholder Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan

Pemetaan stakeholder dilakukan dengan menempatkan setiap aktor pada matriks pengaruh dan kepentingan. Pengaruh berkaitan dengan kemampuan aktor mengarahkan kebijakan, menyediakan anggaran, menyusun regulasi, mengelola data, mengoperasikan jaringan, atau memengaruhi perilaku pengguna air. Kepentingan berkaitan dengan derajat kebutuhan, keterlibatan, dan keterdampakan aktor terhadap implementasi RTTG. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kelompok promoters merupakan aktor yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi, sehingga menjadi penggerak utama dalam legitimasi kebijakan, pengambilan keputusan, integrasi antar-OPD, dan pengawalan implementasi.

Kelompok latents memiliki pengaruh tinggi, tetapi kepentingan operasional hariannya relatif lebih rendah. Peran kelompok ini tetap krusial karena dukungan regulasi, anggaran, dan kewenangan lintas pemerintahan dapat mempercepat atau memperlambat implementasi RTTG. Kelompok defenders memiliki kepentingan tinggi, tetapi pengaruh formalnya lebih rendah. Mereka adalah pengguna air dan pelaksana lapangan yang menentukan apakah jadwal tanam dan pembagian air benar-benar dipatuhi. Karena itu, kelompok ini perlu diberdayakan sebagai mitra verifikasi data, pelaksana kesepakatan tanam, dan pengawas distribusi air. Kelompok

apathetics memiliki pengaruh dan kepentingan rendah, tetapi tetap perlu memperoleh informasi agar tidak muncul kesalahpahaman terhadap kebijakan RTTG.

Tabel 2. Peta Stakeholder Berdasarkan Matriks Pengaruh dan Kepentingan.

Kuadran	Posisi	Pihak/instansi	Strategi komunikasi
Promoters	Pengaruh tinggi - kepentingan tinggi	Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bappeda, PUCKTRP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, penyuluh, P3A/GP3A/IP3A kunci	Dilibatkan intensif sebagai pemberi legitimasi, pengarah kebijakan, pengambil keputusan, dan penggerak koordinasi implementasi.
Latents	Pengaruh tinggi - kepentingan rendah	DPRD, BPKAD, pemerintah provinsi, balai wilayah sungai/instansi teknis terkait, kecamatan, pemerintah desa strategis, Bagian Hukum	Didekati melalui komunikasi manfaat, justifikasi regulasi, kebutuhan anggaran, dan keterkaitan RTTG dengan ketahanan pangan daerah.
Defenders	Pengaruh rendah - kepentingan tinggi	Petani padi, pembudidaya ikan, kelompok tani, Gapoktan, P3A tingkat lapangan, UPT irigasi, masyarakat pengguna air	Diberdayakan sebagai pelaksana jadwal tanam, sumber data lapangan, penerima manfaat, dan pengawas sosial distribusi air.
Apathetics	Pengaruh rendah - kepentingan rendah	Masyarakat umum di luar daerah irigasi prioritas, media/komunitas yang belum memahami isu irigasi, pelaku usaha nonpertanian tertentu	Diberi informasi sederhana melalui infografis, rilis singkat, dan publikasi manfaat agar tidak menjadi sumber misinformasi.



Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder RTTG.

Strategi Pelibatan Stakeholder

Peta stakeholder menegaskan bahwa strategi pelibatan tidak dapat disamakan untuk semua aktor. Promoters perlu dikelola melalui komunikasi strategis berbasis data karena mereka menentukan arah kebijakan, legitimasi, integrasi antar-OPD, dan keberlanjutan implementasi. Pesan kepada kelompok ini perlu menonjolkan keterkaitan RTTG dengan ketahanan pangan, efisiensi pemanfaatan air, penurunan konflik antarpengguna, peningkatan kinerja layanan irigasi, dan penguatan akuntabilitas pemerintah daerah. Bentuk komunikasi yang paling sesuai adalah paparan eksekutif, policy brief, rapat koordinasi lintas sektor, dashboard progres, dan laporan berkala berbasis indikator.

Kelompok latents membutuhkan pendekatan yang menekankan manfaat kelembagaan, urgensi dukungan anggaran, dan kepastian dasar hukum. Meskipun tidak selalu terlibat dalam operasi distribusi air harian, kelompok ini memiliki daya pengaruh terhadap regulasi,

penganggaran, harmonisasi kewenangan, dan dukungan lintas-level pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi kepada DPRD, BPKAD, Bagian Hukum, pemerintah provinsi, dan instansi teknis terkait perlu disusun dalam bahasa legal-formal, dilengkapi justifikasi manfaat pembangunan daerah, dan dikaitkan dengan agenda ketahanan pangan serta efisiensi belanja infrastruktur.

Kelompok defenders memerlukan komunikasi partisipatif, praktis, dan berbasis kebutuhan lapangan. Petani, pembudidaya ikan, kelompok tani, dan P3A tingkat lapangan merupakan aktor yang paling dekat dengan dampak pembagian air, sehingga informasi yang diberikan harus jelas mengenai jadwal tanam, giliran air, hak dan kewajiban pengguna, prosedur pengaduan, serta manfaat RTTG terhadap pengurangan risiko gagal tanam. Pelibatan kelompok ini tidak cukup melalui sosialisasi satu arah, tetapi perlu melalui dialog, verifikasi data bersama, penyuluhan lapangan, dan mekanisme umpan balik agar data teknis pemerintah sesuai dengan kondisi aktual saluran dan kebutuhan lahan.

Kelompok apathetics tidak menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tetap harus dikelola melalui publikasi informasi sederhana. Dalam kebijakan publik, kelompok berpengaruh rendah dapat berkembang menjadi sumber resistensi apabila informasi yang diterima tidak lengkap, terlambat, atau keliru. Oleh karena itu, rilis singkat, infografis umum, media sosial pemerintah, dan narasi manfaat publik perlu disiapkan untuk menjelaskan bahwa RTTG merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga keadilan pemanfaatan air.

Tabel 3. Strategi Pelibatan Stakeholder dalam Implementasi RTTG.

Kuadran	Media/kanal	Pesan utama	Output yang diharapkan
Promoters	Rapat koordinasi, paparan eksekutif, policy brief, dashboard progres, laporan berkala	RTTG sebagai instrumen ketahanan pangan, efisiensi air, pengurangan konflik, dan peningkatan kinerja layanan irigasi	Keputusan formal, arahan teknis-politis, dukungan koordinasi, dan legitimasi implementasi.
Latents	Konsultasi regulasi, telaah anggaran, harmonisasi kebijakan, komunikasi antarlevel pemerintahan	Kebutuhan dasar hukum, alokasi sumber daya, sinergi kewenangan, dan manfaat pembangunan daerah	Dukungan regulasi, alokasi anggaran, penguatan kewenangan, dan kesinambungan program lintas sektor.
Defenders	Sosialisasi lapangan, penyuluhan, diskusi kelompok, infografis teknis sederhana, kanal umpan balik	Jadwal tanam, giliran air, hak-kewajiban pengguna, manfaat pembagian air adil, dan prosedur pengaduan	Kepatuhan jadwal tanam, data lapangan, penerimaan sosial, dan pengawasan distribusi air.
Apathetics	Rilis singkat, media sosial pemerintah, infografis umum, publikasi manfaat	RTTG sebagai dukungan terhadap pangan daerah, kepastian usaha tani, dan kesejahteraan petani	Pemahaman publik, dukungan sosial, dan pencegahan misinformasi.

Implikasi Pemetaan Stakeholder terhadap Tata Kelola Irigasi

Pemetaan stakeholder dalam RTTG berbasis neraca air memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, peta stakeholder membantu pemerintah daerah menentukan prioritas komunikasi dan alokasi energi koordinasi. Dalam situasi keterbatasan waktu, data, dan sumber daya, pemerintah daerah perlu memusatkan komunikasi intensif pada promoters dan defenders. Promoters diperlukan untuk memastikan dukungan institusional, keputusan formal, dan integrasi antar-OPD, sedangkan defenders menentukan apakah kebijakan dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh pengguna air di tingkat lapangan.

Kedua, peta stakeholder membantu mengurangi risiko konflik pembagian air. Konflik biasanya muncul ketika kebutuhan antarwilayah irigasi tidak disepakati, ketika jadwal distribusi dianggap tidak adil, atau ketika pengguna air merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan keputusan. Dengan pemetaan stakeholder, kelompok pengguna air dapat dilibatkan sejak tahap verifikasi data, penyusunan pola tanam, penentuan giliran air, dan pemantauan distribusi. Proses ini membuat RTTG tidak hanya menjadi agenda teknis pemerintah, tetapi juga kesepakatan kerja yang memiliki legitimasi sosial.

Ketiga, pemetaan stakeholder memperkuat fungsi data dalam kebijakan. Neraca air membutuhkan data daerah irigasi, luas baku sawah, sumber air, kondisi jaringan, debit, kebutuhan air tanaman, serta kebutuhan pengguna lain. Data tersebut tidak selalu tersedia secara lengkap pada satu instansi dan sering kali berubah mengikuti kondisi musim, kerusakan jaringan, serta praktik penggunaan air di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara OPD teknis, UPT irigasi, penyuluh, P3A/GP3A, kelompok tani, dan pengguna air diperlukan untuk memastikan akurasi data. Hal ini sejalan dengan literatur yang menempatkan stakeholder engagement sebagai proses pembelajaran sosial dan produksi pengetahuan bersama dalam tata kelola air (Maya-Jariego, 2024; Moreira et al., 2024; Wehn et al., 2018).

Keempat, peta stakeholder memperjelas kebutuhan kelembagaan jangka panjang. RTTG tidak cukup berhenti pada penyusunan dokumen, regulasi, atau jadwal tanam. Implementasi memerlukan forum koordinasi rutin, sistem monitoring debit, mekanisme pengaduan, evaluasi musim tanam, pembaruan data jaringan, dan penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi aktual. Seluruh proses tersebut membutuhkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, OPD teknis, UPT irigasi, penyuluh, kelembagaan petani, dan pengguna air. Dengan demikian, peta stakeholder menjadi dasar desain kelembagaan yang menopang keberlanjutan RTTG.

Kelima, peta stakeholder dapat digunakan sebagai dasar penyusunan indikator keberhasilan komunikasi dan implementasi kebijakan. Indikator tersebut dapat mencakup

jumlah forum koordinasi yang terlaksana, keterwakilan unsur stakeholder, kualitas masukan yang ditindaklanjuti, dukungan regulasi dan anggaran, tingkat pemahaman petani terhadap jadwal tanam, kepatuhan terhadap giliran air, keberadaan mekanisme pengaduan, serta ketersediaan umpan balik lapangan. Indikator seperti ini penting agar keberhasilan RTTG tidak hanya diukur dari tersedianya produk kebijakan, tetapi juga dari mutu koordinasi, penerimaan sosial, kepatuhan pengguna air, dan kemampuan kebijakan beradaptasi dengan dinamika ketersediaan air.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Rencana Tata Tanam Global berbasis neraca air irigasi di Kabupaten Musi Rawas membutuhkan pemetaan stakeholder yang sistematis karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh akurasi perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air, tetapi juga oleh legitimasi kelembagaan, koordinasi lintas sektor, komunikasi kebijakan, dan partisipasi pengguna air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder utama dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran, yaitu promoters, latents, defenders, dan apathetics. Promoters berperan sebagai pengarah kebijakan dan penggerak koordinasi; latents menjadi pendukung regulasi, anggaran, dan kewenangan; defenders menjadi pelaksana lapangan, penyedia informasi aktual, penerima manfaat, dan pengawas sosial; sedangkan apathetics perlu diberi informasi agar tidak menjadi sumber misinformasi. Temuan ini menegaskan bahwa peta stakeholder merupakan instrumen tata kelola untuk menghubungkan data neraca air, operasi irigasi, keputusan kebijakan, kepatuhan petani, dan tujuan ketahanan pangan daerah. Secara praktis, pemerintah daerah disarankan membentuk forum koordinasi RTTG yang melibatkan OPD teknis, penyuluh, UPT irigasi, P3A/GP3A/IP3A, kelompok tani, petani, pembudidaya ikan, DPRD, BPKAD, Bagian Hukum, serta unsur pendukung lintas pemerintahan. Forum tersebut perlu didukung oleh agenda kerja, mekanisme monitoring debit, kanal pengaduan, dan evaluasi musim tanam secara berkala. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman informasi, sehingga penelitian lanjutan dapat menggunakan survei kuantitatif, social network analysis, atau pembobotan multi-kriteria untuk mengukur tingkat pengaruh, kepentingan, dukungan, dan potensi resistensi stakeholder secara lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perangkat daerah terkait, petugas teknis irigasi, penyuluh, P3A/GP3A, kelompok tani, petani,

pembudidaya ikan, dan masyarakat pengguna air yang telah memberikan informasi, masukan, dan dukungan selama proses penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21-53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>.
- D'Agostino, D., Borg, M., Hallett, S. H., Sakrabani, R. S., Thompson, A., Papadimitriou, L., & Knox, J. W. (2020). Multi-stakeholder analysis to improve agricultural water management policy and practice in Malta. *Agricultural Water Management*, 229, 105920. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105920>.
- FAO. (2021). The state of the world's land and water resources for food and agriculture: Systems at breaking point. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/cb7654en>.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Garcia-Chevesich, P. A., Valdés-Pineda, R. M., Roy, T., & Valdes, J. (2025). Editorial: Water governance across management scales. *Frontiers in Water*, 7, 1623330. <https://doi.org/10.3389/frwa.2025.1623330>.
- Handayani, W., Dewi, S. P., & Septiarani, B. (2023). Toward adaptive water governance: An examination on stakeholders engagement and interactions in Semarang City, Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 25(2), 1914-1943. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02124-w>.
- Houar, K., Fetoui, M., & Bellal, S. A. (2024). Pathways for improving water governance in Western Algeria: A multi-stakeholder analysis. *Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum*, 23(1), 57-70. <https://doi.org/10.31648/aspal.9021>.
- Kharanagh, S. G., Banihabib, M. E., & Javadi, S. (2020). An MCDM-based social network analysis of water governance to determine actors' power in water-food-energy nexus. *Journal of Hydrology*, 581, 124382. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124382>.
- Korekallu Srinivasa, A., & Mithöfer, D. (2024). Unpacking stakeholder perceptions on challenges for increasing adoption of solar-powered irrigation systems in India: A Q methodology study. *Q Open*, 4(2), qoae020. <https://doi.org/10.1093/qopen/qoae020>.
- Lee, M., Yoon, J.-H., Yang, J. E., Namkoong, S., & Kim, H. (2024). Stakeholder analysis for effective implementation of water management system: Case of groundwater charge in South Korea. *Heliyon*, 10(3), e24699. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24699>.
- Lim, C. H., Wong, H. L., Elfithri, R., & Teo, F. Y. (2022). A review of stakeholder engagement in integrated river basin management. *Water*, 14(19), 2973. <https://doi.org/10.3390/w14192973>.

- Lubell, M., & Fulton, A. (2021). The role of social networks in collaborative governance: A case study of California water management. *Environmental Management*, 67(5), 771-783. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01440-4>.
- Maya-Jariego, I. (2024). Using stakeholder network analysis to enhance the impact of participation in water governance. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, 442. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02958-x>.
- Moreira, F. D., Fonseca, P. R. S., Miranda, R. M., Oliveira da Costa, L., & Mejias Carpio, I. E. (2024). Stakeholder engagement for inclusive water governance in a rural community in Brazil. *Frontiers in Water*, 6, 1378514. <https://doi.org/10.3389/frwa.2024.1378514>.
- OECD. (2015). Stakeholder engagement for inclusive water governance. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264231122-en>.
- Salamanca-Cano, A. K., & Durán-Díaz, P. (2023). Stakeholder engagement around water governance: 30 years of decision-making in the Bogotá River Basin. *Urban Science*, 7(3), 81. <https://doi.org/10.3390/urbansci7030081>.
- Sarami-Foroushani, T., Balali, H., & Movahedi, R. (2024). Assessing the role of stakeholders in sustainable groundwater resources management using power-interest matrix (PIM): In Hamedan-Bahar plain, Iran. *Frontiers in Water*, 6, 1344856. <https://doi.org/10.3389/frwa.2024.1344856>.
- UNESCO, & UN-Water. (2024). The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace. Paris: UNESCO.
- Wehn, U., Collins, K., Anema, K., Basco-Carrera, L., & Lerebours, A. (2018). Stakeholder engagement in water governance as social learning: Lessons from practice. *Water International*, 43(1), 34-59. <https://doi.org/10.1080/02508060.2018.1403083>.
- Whitley, H., Engle, E. W., Brasier, K. J., Eaton, W. M., Burbach, M. E., Fowler, L. B., Bonilla Anariba, S., Butzler, E., Dixon, K., Kumar Chaudhary, A., & Whitmer, W. (2025). Stakeholder engagement in water resource management: A systematic review of definitions, practices, and outcomes. *Journal of Environmental Planning and Management*, 68(11), 2523-2544. <https://doi.org/10.1080/09640568.2024.2323611>.